

BAB II

MARY JANE VELOSO, JASS SOUTHEAST ASIA, DAN KETERLIBATAN ADVOKASI

Kasus yang menimpa Mary Jane Veloso telah mencuri perhatian publik sejak tahun 2010. Problema kian mencuat pada tahun 2015 ketika Mary akan menghadapi ancaman hukuman mati atas dakwaan penyelundupan narkotika di Indonesia. Banyak organisasi yang menganggap hukuman tersebut tidak proporsional, salah satunya datang dari JASS Southeast Asia. Pada bab ini penulis akan menjabarkan secara rinci kronologi kasus Mary Jane Veloso, JASS Southeast Asia sebagai aktor advokasi, serta keterlibatan mereka dalam menyuarakan kasus tersebut.

2.1 Mary Jane Veloso: Dari Pekerja Migran hingga Terpidana Mati

Mary Jane Fiesta Veloso tumbuh dalam kondisi kemiskinan di Desa Nueva Ecija, Filipina. Faktor kemiskinan membuat dirinya tidak dapat melanjutkan pendidikan, setelah hanya menyelesaikan satu tahun sekolah menengah pertama (Briscoe dkk., 2021). Beban ekonomi keluarga semakin berat ketika ia menikah dan memiliki dua orang anak laki-laki, tetapi suaminya tidak mampu menyediakan penghasilan yang stabil. Oleh karena itu, Mary mengambil pilihan untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga. Mary memulai kontrak kerjanya sebagai pekerja rumah tangga di Dubai, tetapi setelah menetap 10 bulan, Mary justru mengalami percobaan pemerkosaan oleh juru masak majikannya, sehingga ia melarikan diri dan menjual semua barang miliknya agar dapat membeli tiket pulang ke Filipina (Briscoe dkk., 2021).

Pada 18 April 2010, Maria Cristina Sergio, yang merupakan teman Mary menawarkan pekerjaan rumah tangga di Malaysia, serta meminta 20.000 Peso untuk biaya keberangkatannya (Jaringan Tolak Hukuman Mati & LBH Jakarta, 2022). Namun, ketika tiba di Malaysia, Maria justru menyarankan pekerjaan alternatif di Indonesia karena posisi yang dijanjikan sebelumnya sudah tidak tersedia (Briscoe dkk., 2021). Maria kemudian meyakinkan Mary dengan memenuhi segala kebutuhannya dan mengurus dokumen perjalanan. Faktanya, pola semacam ini merupakan salah satu penyebab terjadinya perdagangan manusia di kalangan migran, terutama melalui jaringan rekrutmen informal. Menurut Busza dkk. (2023, dikutip dalam Fernández-Sánchez dkk., 2025), calon pekerja migran di beberapa daerah terpencil justru tidak dapat mengakses agen formal, sehingga mereka cenderung beralih ke broker lokal, kontak sosial atau orang terdekat. Mary akhirnya mempercayai tawaran tersebut tanpa pengetahuan penuh tentang risiko eksploitasi dan *trafficking* (Briscoe dkk., 2021).

Setibanya di Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta, Indonesia pada 25 April 2010, Mary ditangkap oleh otoritas Bea Cukai karena membawa tas koper berisi heroin seberat 2,6 kilogram (Briscoe dkk., 2021; Regar dkk., 2024). Menurut pernyataan dari Persatuan Pengacara Rakyat Nasional (NUPL), narkoba ditempatkan secara rahasia dan diberikan saat berada di Malaysia tanpa sepengetahuan, persetujuan, maupun niat dari Mary itu sendiri (Alaidrus, 2023). Adapun hasil tes narkoba terhadap Mary menunjukkan negatif, dan Mary juga konsisten menyatakan bahwa dirinya hanya disuruh oleh Maria, sehingga tidak mengetahui tentang narkoba di dalam tasnya (Wicaksana dkk., 2016). Akan

tetapi, kesaksian Mary diabaikan begitu saja, sehingga berujung pada vonis pidana mati. Seharusnya, kesaksian tersebut dapat menjadi pertimbangan dengan mengumpulkan berbagai fakta dan investigasi secara menyeluruh oleh penasihat hukum (Wicaksana dkk., 2016).

Pada Oktober 2010, Mary dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, sesuai UU No. 35 Pasal 114 Ayat 2 Tahun 2009 tentang narkoba (BBC News Indonesia, 2024). Setelah vonis, Mary beserta pengacaranya mengajukan banding dan meminta Peninjauan Kembali (PK), tetapi semua upaya tersebut ditolak. Majelis Hakim baik di tingkat pengadilan negeri, banding, kasasi, dan permintaan PK sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi Mary sebagai buruh migran (Wicaksana dkk., 2016). Lebih jauh lagi, Presiden Joko Widodo juga menolak permohonan grasi pada tahun 2014, sehingga Mary dijadwalkan untuk dieksekusi mati bersama delapan terpidana lainnya (Briscoe dkk., 2021). Penolakan grasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah Indonesia yang mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu sanksi pidana terhadap terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Dua hari sebelum dibawa ke Nusakambangan, Mary sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk yang kedua kalinya, tetapi lagi-lagi tidak dikabulkan karena adanya aturan pembatasan pengajuan PK sesuai dengan SEMA No.7 Tahun 2014 (BBC News Indonesia, 2024). Sehari sebelum jadwal eksekusi pada 29 April 2015, Mary diberikan penangguhan oleh Jaksa Agung H. M. Prasetyo setelah mengetahui bahwa perekrutnya, Maria, menyerahkan diri ke Kepolisian Cabanatuan di Filipina (Tim detikNews, 2024). Penangguhan tersebut

diajukan langsung oleh Presiden Filipina, Benigno Aquino III agar Indonesia memberikan Mary kesempatan untuk bersaksi melawan Maria atas dakwaan perdagangan manusia, perekrutan ilegal, dan penipuan (Briscoe dkk., 2021). Kendati ditunda, H. M. Prasetyo menyatakan bahwa penundaan eksekusi bukan berarti pembatalan hukum terhadap Mary, sebagaimana yang disampaikan pula oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo kala itu (BBC News Indonesia, 2024). Penangguhan eksekusi tidak diketahui batas waktunya, sehingga Mary tetap ditahan di Indonesia lebih dari satu dekade.

Pada Januari 2020, pengadilan di Nueva Ecija, Filipina resmi menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada perekrut Mary, yakni Maria Kristina Sergio dan Julius Lacanilao atas dakwaan *large-scale illegal recruitment* (Lagrimas, 2020). Putusan tersebut semakin memperkuat klaim bahwa Mary merupakan korban perdagangan manusia. Pada September 2022, Menteri Luar Negeri Enrique Manalo meminta Indonesia untuk memberikan grasi eksekutif kepada Mary, dan pada Januari 2024, Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menerima jaminan dari Indonesia bahwa kasus Mary akan ditinjau kembali (GMA Network, 2023). Setelah hampir 15 tahun ditahan, Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan bahwa Indonesia dan Filipina telah mencapai kesepakatan untuk memulangkan Mary ke Filipina. Kesepakatan ini terjadi pada 6 Desember 2024 dengan penandatanganan *Practical Agreement* oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan Indonesia, serta Raul Vasquez yang mewakili Departemen Kehakiman Filipina (Portal AHU, 2024). Pada 18 Desember 2024, Mary resmi dipulangkan ke

Filipina melalui mekanisme *transfer of prisoner* (ToP) setelah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto (Rachmawati, 2024). Akan tetapi, mekanisme ToP menegaskan bahwa pemindahan tersebut berarti mengembalikan seorang narapidana ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan (Komnas Perempuan, 2024). Oleh karena itu, meskipun repatriasi merupakan pencapaian yang signifikan, status hukum Mary belum sepenuhnya terselesaikan.

2.1.1 Kerentanan Berlapis (Kelas, Gender, Status Migran)

Keputusan Mary untuk bermigrasi hingga menjadi korban perdagangan manusia, serta menerima vonis pidana mati, tidak lagi dapat dipahami melalui satu dimensi tunggal. Kasus ini menunjukkan kerentanan berlapis yang cenderung dialami oleh pekerja migran perempuan. Kerentanan tersebut adalah hasil dari berbagai kondisi struktural yang bersilangan dan saling mempengaruhi satu sama lain (Bastia dkk., 2023). Dalam konteks kerentanan Mary, kondisi-kondisi ini dapat mencakup faktor kemiskinan, gender, dan statusnya sebagai migran.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Mary tumbuh dengan kemiskinan dan bahkan tidak mampu menyelesaikan pendidikannya. Mary kemudian memasuki sektor migrasi tenaga kerja domestik, yakni pekerjaan informal atau pekerjaan rumah tangga, tanpa mengetahui risiko yang akan dihadapinya. Hal ini didorong oleh keinginan Mary untuk lepas dari kemiskinan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sehingga ia mencari pekerjaan rumah tangga di luar negeri dan

meninggalkan keluarganya (Briscoe dkk., 2021). Dalam konteks Asia Tenggara, mayoritas perempuan yang menghadapi ancaman hukuman mati atas kasus narkoba adalah WNA dengan kondisi sosio-ekonomi rendah yang berperan sebagai kurir (Hoyle & Harry, 2020), persis seperti Mary. Meskipun Mary sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya telah dijadikan kurir narkoba, namun pilihan seperti ini umum dilakukan oleh para perempuan Filipina dari latar belakang sosial-ekonomi serupa karena tidak adanya alternatif lain, sehingga mereka dapat menghidupi kebutuhan keluarga dan menekan kemiskinan (Garabiles dkk., 2017).

Selanjutnya, stereotip gender yang masih berakar di suatu negara dapat membatasi kesempatan perempuan di dunia kerja. Perempuan yang bekerja di sektor domestik atau dalam lingkup rumah tangga kerap menghadapi stereotip serta konstruksi sosial yang cenderung tidak setara dari kalangan masyarakat (Pusparani dalam Hakim & Sari, 2023). Di Filipina, stereotip gender dan diskriminasi terhadap perempuan menjadi permasalahan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, meliputi pekerjaan, kepemimpinan, dan pekerjaan perawatan tanpa upah (Mangarin & Bungabong, 2024). Menurut data yang dikeluarkan oleh Filipina Overseas Employment Administration (POEA), tercatat 95% pekerja domestik Filipina di luar negeri adalah perempuan (UN Women dalam Lee & Piper, 2017). Data tersebut tidak hanya menggambarkan bagaimana perempuan Filipina memainkan peran penting dalam menopang kehidupan rumah tangga, tetapi juga mereka tidak punya

pilihan selain bekerja di sektor domestik. Adapun rumah tangga secara konvensional kerap kali dianggap sebagai keutamaan feminim, yang kemudian memperkecil lingkup perempuan agar bekerja sesuai urusan rumah tangga, dan bergantung kepada laki-laki (Wong dalam Dhewy, 2017). Kondisi ini menjadi konteks penting untuk memahami keputusan Mary yang memilih bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga.

Namun demikian, dominasi pekerja perempuan di sektor domestik tidak serta-merta diikuti dengan perlindungan hukum yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia. Menurut Novemyanto dkk. (2025), kerentanan muncul karena pekerja domestik masih belum diakui sebagai subjek hubungan kerja formal, serta terjebak dalam ruang kerja privat yang minim pengawasan negara. Bentuk kerentanan semacam ini dialami pula oleh Mary ketika ia memutuskan sebagai pekerja rumah tangga, tetapi justru dirinya terjerat kasus pidana di Indonesia. Status migran dan keterbatasan ekonomi semakin mempersulit posisinya untuk mendapatkan dukungan hukum yang memadai. Sebagai contoh, Mary tidak memperoleh penerjemah kompeten sebagai jembatan komunikasi, baik dengan pengacara, maupun hakim pengadilan, sehingga ia tidak memiliki pemahaman jelas terkait proses pidana yang akan menentukan nasibnya (Briscoe dkk., 2021). Adapun, sistem hukum di Indonesia saat itu lebih mengutamakan konfirmasi berita polisi, barang bukti, dakwaan jaksa, serta substansi peraturan perundang-undangan, daripada mempertimbangkan motif dasar perempuan ketika melakukan

tindakannya (Irianto dalam Wicaksana dkk., 2016). Oleh karena itu, vonis pidana mati terhadap Mary tidak hanya berdampak secara personal, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi hukum yang mengabaikan prinsip kemanusiaan (Sutanto, 2025). Dalam konteks Asia Tenggara, mayoritas perempuan yang menghadapi ancaman hukuman mati atas kasus narkoba (kurir) adalah WNA dengan kondisi sosio-ekonomi rendah (Hoyle & Harry, 2020), persis seperti kondisi Mary.

2.2 Aktor Advokasi JASS Southeast Asia

2.2.1 Sejarah Awal dan Ekspansi Regional

Organisasi induk dari JASS Southeast Asia adalah Just Associate atau dikenal juga dengan akronim JASS, sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) internasional yang beroperasi di Mesoamerika, Afrika Selatan, dan Asia Tenggara (Just Associates, 2025). Organisasi ini didirikan pada tahun 2003 oleh Lisa Veneklasen dan Valerie Miller, yang awalnya sebagai jejaring praktik informal untuk menghimpun para aktivis, akademisi, serta anggota pendidik dari berbagai negara. Berlandaskan keyakinan bahwa kekuatan yang terhimpun mampu menciptakan transformasi fundamental, JASS menginisiasi jaringan aktivisme lintas negara melalui advokasi yang berkaitan dengan hak, perlindungan, keadilan, serta perlawanan terhadap diskriminasi. Adapun bidang fokus dari JASS itu sendiri, yakni memajukan hak dan kepemimpinan

perempuan adat, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, dan melindungi pembela HAM perempuan (Channel Foundation, 2026).

Sejak pertama kali didirikan, JASS mengadopsi makna ganda yang bersifat ironis dari kata “*just*” untuk menggambarkan dua hal utama; sebagai wujud kerendahan hati seorang pendidik populer yang berperan memfasilitasi, serta mengorganisir kepemimpinan kolektif; dan sebagai simbol komitmen mereka terhadap kesetaraan sosial (Just Associates, 2025). Titik balik genting terjadi pada tahun 2006 ketika para pendiri JASS berkumpul di Bangkok setelah mengetahui adanya peningkatan ancaman terhadap kebebasan perempuan. Dalam pertemuan tersebut, mereka memutuskan untuk menata ulang atau “*back-to-basic*”, yakni bertransformasi menjadi organisasi perempuan yang bertujuan untuk pengorganisasian feminis dari bawah ke atas, serta dimanapun tempat perempuan berada (Just Associates, 2025). Transformasi ini mencerminkan keyakinan mendasar JASS bahwa gerakan feminis tidak cukup apabila dibangun di tingkat nasional, regional, atau global saja, melainkan dari akar rumput. Desti Murdijana, Regional Organizer JASS Southeast Asia menyampaikan bahwa:

Kami merasa sangat penting untuk menguatkan di tingkat akar rumput. Pengalaman belajar dan strategi yang ada pada JASS semua berangkat dari pengalaman perempuan-perempuan pejuang di akar rumput. Dan karena dengan pendekatan feminis dimana pengalaman perempuan adalah pengetahuan, jadi kita tidak dapat meminggirkan pengalaman tersebut (Murdijana, komunikasi pribadi, 10 April 2026).

Komitmen JASS untuk membangun gerakan dari akar rumput tidak berhenti pada level ideologis. Mereka menyediakan berbagai perangkat penguatan gerakan, meliputi panduan keselamatan pribadi dan komunitas, hingga alat-alat analisis yang dapat membantu para aktivis untuk memahami struktur penindasan. Salah satu alat analisis yang paling sering digunakan adalah analisis kekuasaan untuk membantu memetakan bagaimana kekuasaan bekerja dalam berbagai konteks, termasuk ketidaksetaraan antara Global South dan Global North (Murdijana, wawancara, 10 April 2026). Dengan demikian, transformasi sosial dibangun dengan menuntut adanya perubahan dinamika kekuasaan, secara khusus mempertajam struktur dan cara gerak JASS sendiri. Mereka mengambil jalan yang lebih proaktif dengan fokus penguatan aktivis dan organisasi perempuan melalui pendekatan politik pemberdayaan, kepemimpinan, serta pengembangan gerakan (Just Associates, 2025).

Dari transformasi tersebut, JASS memiliki berbagai visi utama, meliputi kebebasan (*freedom*), martabat (*dignity*), rasa hormat (*respect*), serta kesejahteraan (*wellbeing*) yang bertumpu pada kepedulian terhadap manusia dan bumi (Just Associates, 2025). Bagi JASS, visi ini bukan sekadar kata-kata saja, melainkan sebagai nilai yang menegaskan setiap organisasi untuk menciptakan ruang sosial atau memberdayakan perempuan, khususnya mereka yang berasal dari kelompok miskin dan kelas pekerja, memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan kesetaraan, serta menjamin perlindungan hak seluruh individu (Just Associates, 2025).

Sejalan dengan pernyataan Sari & Rif'at (2024), bahwa organisasi pemberdayaan perempuan merupakan bentuk proses menumbuhkan kesadaran kritis dan memperkuat kapasitas perempuan agar semakin terlibat dalam partisipasi, pengawasan, pengambilan keputusan, serta mendorong perubahan transformatif guna mewujudkan kesetaraan gender.

Sebagai bagian dari visi utamanya, JASS meluncurkan inisiatif bertajuk “*Imagining and Rebuilding Women’s Movements for the Future*”, yang kemudian direalisasikan melalui forum *Movement-building Institutes (MBIs)* di tiga kawasan strategis. Salah satu kawasan tersebut adalah Asia Tenggara, tepatnya digelar di Indonesia (2007) dan Thailand (2008). Disinilah JASS Southeast Asia menjadi perpanjangan jaringan dari JASS khusus kawasan Asia Tenggara, yang juga lahir dari kesadaran kolektif para aktivis perempuan. Kesadaran ini berkaitan dengan konteks historis perempuan Asia Tenggara yang cenderung menghadapi ketidakstabilan ekonomi akibat neoliberal, sehingga muncul perjuangan anti-kolonial, revolusioner, dan pembebasan selama beberapa dekade (Okazawa-Rey, 2019). Dampak dari tradisi tersebut mendorong terbentuknya pasar tenaga kerja yang murah dan tingginya kebutuhan pekerja perempuan di sektor informal. Studi oleh Yang (2016, dalam Safitri, 2025) menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN (Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia) memiliki upah tenaga kerja yang rendah, tantangan biaya lahan dan utilitas, kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang terampil, masalah infrastruktur, kompleksitas dan transparansi peraturan pemerintah, serta

ketidakpastian rezim pajak. Lebih jauh lagi, analisis feminis terhadap globalisasi kapitalisme neoliberal telah mengungkap bagaimana proses dan dampaknya disebabkan oleh gender, serta bersinggungan dengan dinamika hubungan kekuasaan antarnegara (Okazawa-Rey, 2019).

Sejak tahun 2006, JASS Southeast Asia secara konsisten menghadirkan program penguatan kepemimpinan dan pendampingan politik berkelanjutan bagi para aktivis perempuan akar rumput, terutama bagi mereka yang memperjuangkan keadilan di kawasan Asia Tenggara (Okazawa-Rey, 2019). Sebagai contoh, JASS Southeast Asia bekerja sama dengan para mitranya untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan di Myanmar dan Kamboja melalui serikat buruh untuk mendukung pekerja perempuan di sana (Just Associates, 2025). JASS Southeast Asia mengembangkan kepemimpinan perempuan Kamboja dalam perjuangan lokal melalui Cambodian Young Women's Empowerment Network (CYWEN) yang didirikan pada tahun 2010. CYWEN mewadahi sebuah diskusi meja bundar, aktivitas kampanye (isu pemerkosaan, migrasi, akses pendidikan, dan kematian ibu), serta penggunaan alat media sosial Facebook bagi para siswa sekolah menengah atas dan mahasiswa perempuan di berbagai provinsi Kamboja (Okazawa-Rey, 2019). Selain itu, terdapat penguatan kapasitas gerakan oleh JASS Southeast Asia di Indonesia, Filipina, Kamboja, dan Myanmar melalui sebuah pendekatan strategis *Follow the Money* (FTM). FTM adalah komunitas untuk melacak aliran keuangan, memetakan aktor dan kepentingan terkait perampasan

tanah, eksploitasi buruh, kerusakan lingkungan, serta strategi kolektif untuk perlawanan (Just Associates, 2024).

Desti Murdijana turut merinci jaringan mitra lainnya yang sudah cukup lama bekerja sama dengan JASS Southeast Asia. Di Indonesia, mitra utamanya meliputi FAMM (Forum Aktivistis Perempuan Muda) Indonesia, Perempuan Mahardhika, FAHMINA, dan Rumah KitaB (Murdijana, komunikasi pribadi, 10 April 2026). Sedikit tentang program JASS Southeast Asia di Indonesia, terdapat program 4 tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada (GAC), yakni We Lead JASS sebagai pergerakan transformatif oleh JASS Southeast Asia dan Hivos Southeast Asia bersama organisasi mitranya, mencakup FAMM Indonesia, Fahmina, Perempuan Mahardhika, Rahima, dan Rumah KitaB sebagai konsorsium We Lead yang berdampak positif terhadap kehidupan dan kepemimpinan perempuan di Indonesia (Okazawa-Rey, 2019). Kemudian di Thailand bermitra dengan kelompok yang bekerja pada isu LBT (Lesbian, Biseksual, & Trans), lalu di Myanmar terdapat STUM, yakni sebuah organisasi buruh yang tergolong cukup besar di negara tersebut, sementara di Filipina terdapat MASIPAG yang berfokus pada isu kesehatan dan ketahanan pangan, serta CWR (Center for Women's Resources) (Murdijana, wawancara, 10 April 2026). Lebih jauh terkait program JASS Southeast Asia di Filipina, mereka mendorong perempuan muda Filipina untuk menciptakan suara kolektif mereka sendiri melalui kerja sama dengan *Young Woman Initiatives/YouWin*, sementara bersama

GABRIELA Youth meluncurkan kampanye dalam mengupayakan hak-hak demokratis perempuan muda (Okazawa-Rey, 2019).

Yang membedakan cara kerja JASS dari lembaga donor pada umumnya adalah posisi mereka sebagai mitra strategis, bukan organisasi pemberi dana. Hal ini dipertegas oleh Desti Murdijana (komunikasi pribadi, 10 April 2026) terkait peran JASS sebagai ‘kawan diskusi’ yang membantu para organisasi lokal untuk memperkuat strategi gerakan, atau bekerja bersama dalam satu program yang dikembangkan secara kolektif. Dari berbagai program itulah, JASS bersama mitranya mengembangkan strategi, mendokumentasikan perjuangan perempuan akar rumput yang selama ini diabaikan, serta mendorong keterlibatan mereka dalam memahami dan merespons berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi. Oleh karena itu, JASS mengadopsi Teori Perubahan (*Change Theory*) yang digunakan untuk menjalankan program, strategi advokasi, serta membangun aliansi bersama mitranya. Teori tersebut berisi *feminist movement building* dengan tiga strategi perubahan (kekuasaan, mobilisasi kekuasaan, dan transformasi kekuasaan), *organizing and mobilizing power* (kepemimpinan perempuan dan perspektif feminis di seluruh gerakan), serta *transforming power* (berdampak pada kebijakan, gagasan, dan pendanaan) (Just Associates, 2025).

JASS berupaya menjadi organisasi jangka panjang dengan memprioritaskan penguatan kapasitas aktivis perempuan akar rumput, sehingga memiliki daya tahan dan kemampuan berjuang yang

berkelanjutan. Melalui mitra organisasi lokal di berbagai negara kawasan Asia Tenggara, JASS Southeast Asia membangun reputasi sebagai aktor non-negara yang aktif dalam menyuarakan isu-isu perempuan secara transnasional. Mereka juga rutin mengeluarkan laporan tahunan, serta terus memperbarui situs resminya agar dapat menampilkan program yang masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bagaimana komitmen JASS Southeast Asia menjadi simpul penting dalam advokasi feminis transnasional, serta responsif terhadap persoalan struktural yang menimbulkan kerentanan perempuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Desti Murdijana bahwa:

Ini yang ingin kita sebar juga bahwa perempuan punya banyak kekuatan, dan bisa kita temukan di banyak tempat, hanya saja selama ini karena pendekatan lebih ke perspektif laki-laki, sehingga yang sering mendapatkan perhatian selalu tokoh laki-laki atau strategi yang diciptakan oleh laki-laki. Dan ternyata strategi penguatan gerakan perempuan ini memang cukup unik, cukup berbeda, tetapi itulah kekuatannya sebetulnya (Murdijana, komunikasi pribadi, 10 April 2026).

Demikianlah JASS Southeast Asia berdiri sebagai perpanjangan JASS di kawasan Asia Tenggara dengan pendekatan khas memperkuat gerakan akar rumput tanpa meninggalkan konteks lokal.

2.2.1 Representasi “*Intersectionality*” sebagai Ide Feminisnya

Just Associate (JASS) menempatkan interseksionalitas sebagai salah satu ide besar untuk memahami ketidakadilan sosial dan alat fundamental untuk membangun sebuah gerakan (*movement building*). Interseksionalitas bukan sekadar wacana, melainkan pendekatan feminis yang menggerakkan JASS. Desti Murdijana menyatakan bahwa:

Kami secara terbuka menyatakan bahwa kami organisasi feminis. Kami menggunakan pendekatan-pendekatan feminis, misalnya memberikan perhatian pada interseksionalitas bahwa perempuan mempunyai latar belakang yang sangat beragam (Murdijana, komunikasi pribadi, 10 April 2026).

Pemahaman JASS terhadap interseksionalitas berpijak pada definisi “*intersectionality*” yang pertama kali dicetuskan oleh Kimberlé Crenshaw. Menurut Crenshaw (1989, dalam Just Associates, 2022), interseksionalitas adalah lensa atau prisma yang melihat berbagai jenis ketidaksetaraan saling bergerak dan memperburuk satu sama lain. Ayesha Imam (dalam Just Associates, 2022) menjelaskan bahwa interseksionalitas berkembang sebagai respons terhadap kritik bahwa kategori perempuan dalam politik cenderung terlalu menyederhanakan dan menggeneralisasi pengalaman, khususnya lebih mengakomodasi perspektif perempuan kulit putih sekaligus mengabaikan bagaimana faktor ras, kelas, kolonialisme, dan bentuk diskriminasi lainnya saling berkelindan dalam membentuk pengalaman diskriminatif. Oleh karena itu, konsep interseksionalitas berupaya melampaui identitas tunggal untuk menganalisis kompleksitas hubungan antara privilese dan subordinasi. Berkaitan dengan konsep tersebut, JASS menganut istilah “*The personal is political*” yakni sebuah keyakinan bahwa pengalaman pribadi setiap perempuan sekaligus persoalan politis yang tidak bisa diabaikan. JASS mendorong pemahaman bahwa hak dan kehidupan politik perempuan tidak semata-mata berkaitan dengan pemilu atau hak pilih, melainkan mencakup seluruh dimensi

kehidupan perempuan yang selama ini tidak diakui sebagai arena politik (Murdijana, komunikasi pribadi, 10 April 2026).

Seiring perkembangannya, interseksionalitas direpresentasikan ke dalam kerangka kerja dan program JASS. Misalnya dalam kerangka kerja Just Associates (2022), interseksionalitas merupakan alat analisis dan strategi yang memiliki makna pada tiga level; (1) level identitas mencakup ras, etnis, kelas, gender, seksualitas, kemampuan membentuk pengalaman kekuasaan, privilese, dan keamanan yang berbeda-beda; (2) level sistem yakni institusi sosial dibentuk oleh logika yang saling tumpah tindih seperti patriarki, kapitalisme, supremasi kulit putih, dan kolonialisme; (3) level solusi yakni pengalaman hidup dari berbagai identitas merupakan basis pengetahuan untuk membayangkan dan memimpin perubahan. Selanjutnya, salah dua program JASS seperti dialog *Women Radically Transforming a World in Crisis* yang mewadahi perempuan Global South untuk menyoroti dampak dari pandemi COVID-19 dapat memperkuat otoritarianisme, ketidakadilan struktural, serta kontrol sosial, sementara bersama Feminist Centre for Radical Justice (FCJR) membangun *Feminist Movement Builders' School*. untuk memperkuat analisis kolektif tentang kepemilikan, identitas, dan kewarganegaraan, serta peningkatan mobilisasi transnasional oleh aktor negara dan non-negara terhadap isu-isu gender, ras, maupun kelas yang saling terhubung (Just Associates, 2020; Just Associates, 2024). Secara tidak langsung, program-program ini

menunjukkan representasi interseksionalitas dalam penguatan gerakan feminis lintas negara.

Dalam praktik advokasi, JASS berupaya memastikan bahwa advokasi yang dilakukan tidak bersifat homogen, tetapi bergantung pada situasi spesifik yang mereka alami. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, inti dari pemahaman interseksionalitas JASS adalah tidak menggeneralisasi pengalaman perempuan. Hal ini turut disampaikan oleh Desti Murdijana bahwa “Kita tidak ingin menggeneralisasi karena pengalaman perempuan sangat beragam, dan latar belakang perempuan juga sangat beragam” (Murdijana, komunikasi pribadi, 10 April 2026). Ketika konteksnya adalah pekerja migran perempuan, interseksionalitas mampu mengidentifikasi kerentanan sebagai hasil dari kombinasi berbagai faktor yang mempersempit pilihan seseorang. Desti Murdijana turut menambahkan “Ada lapis-lapis yang lain kenapa dia bisa terjebak disitu”, yakni dapat berupa kemiskinan, status sebagai ibu tunggal, serta relasi yang tidak setara dengan pihak yang memberikan pekerjaan (Murdijana, komunikasi pribadi, 10 April 2026).

Dengan menyertakan interseksionalitas dalam praktik advokasinya, JASS dapat mengartikulasikan tuntutan dan membangun koalisi. JASS bahkan menekankan seluruh aktivitas kepemimpinan dan pendampingan mereka dipandu oleh pedoman “*power*” dan “*intersectionality*”, yang dapat mengidentifikasi berbagai ketidakadilan, sekaligus memperkuat solidaritas lintas isu maupun kelompok. Pedoman tersebut memungkinkan

JASS untuk membangun strategi yang lebih efektif, memperkuat aliansi antar-gerakan, serta menetapkan prioritas dan mengembangkan pendekatan kolektif agar tercipta perlindungan aktivis ketika mereka bekerja dalam tekanan (Just Associates, 2025). Inilah yang menjadikan interseksionalitas tidak hanya relevan secara analitis, tetapi juga untuk merancang strategi advokasi agar tepat sasaran tanpa menyederhanakan kompleksitas pengalaman perempuan

2.3 Keterlibatan JASS Southeast Asia dalam Advokasi Mary Jane Veloso

Keterlibatan berbagai organisasi dalam kasus Mary Jane Veloso tidak terlepas dari terbatasnya ruang pembelaan yang tersedia pada saat itu. Di Indonesia, proses hukum terhadap Mary tetap berlanjut meskipun muncul berbagai klaim bahwa dirinya merupakan korban perdagangan manusia. Penolakan grasi oleh pemerintah Indonesia serta kuatnya narasi perang terhadap narkoba turut mempersempit kemungkinan perubahan kebijakan. Di sisi lain, pemerintah Filipina pada awal proses penahanan Mary juga dinilai lambat dan kurang responsif dalam memberikan pendampingan maupun perlindungan terhadap Mary Jane Veloso. Kondisi tersebut kemudian mendorong organisasi masyarakat sipil dan jaringan advokasi lintas negara untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menyuarakan kasus Mary.

Keterlibatan JASS Southeast Asia sebagai organisasi yang turut mengadvokasikan kasus ini bermula ketika jadwal eksekusi terhadap Mary semakin dekat pada 29 April 2015. Momentum tersebut tidak hanya memicu

respons dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang mengupayakan mobilisasi dukungan secara lintas negara, tetapi juga JASS Southeast Asia. Seruan advokasi diangkat oleh Migrante International, sebuah organisasi yang aktif membela hak-hak maupun kesejahteraan para pekerja migran Filipina sejak tahun 1996 (Migrante International, 2021). Migrante merilis *“Appeal for Urgent Action”* yang ditunjukkan kepada jaringan global, aliansi organisasi, dan negara anggota organisasinya di seluruh dunia agar memperoleh dukungan advokasi (Migrante International & National Union of People’s Lawyers, 2015).

Dalam konteks ini, Migrante bukanlah mitra resmi dari JASS Southeast Asia, melainkan pihak yang memiliki koneksi erat. Dan karena adanya koneksi tersebut, JASS Southeast Asia mempunyai akses untuk memperluas advokasi secara transnasional, JASS Southeast Asia kemudian bergabung untuk mengadvokasikan kasus Mary dengan menggunakan tagar #SaveMaryJane. Adapun mitra resmi dari JASS Southeast Asia pada saat itu adalah organisasi-organisasi di Filipina, yakni GABRIELA, SAMAKANA (Samahan ng Maralitang Kababaihang Nagkakaisa atau United Organization of Urban Poor Women), dan CWR (Center for Women’s Resources). Ketiga organisasi ini turut mengambil bagian dalam aksi massa untuk menekan penundaan eksekusi mati dan pembebasan Mary (Langara, 2015). Koordinasi dengan organisasi-organisasi Filipina berjalan dengan baik karena mereka sudah terorganisir secara mandiri, termasuk Osang Langara sebagai narasumber yang juga termasuk anggota GABRIELA, relawan CWR serta SAMAKANA (Langara, wawancara, 6 April 2026).

JASS Southeast Asia mengambil peran yang lebih aktif dengan memobilisasi jaringan di Indonesia dan Kamboja. Mobilisasi di Indonesia dilakukan melalui FMM Indonesia (Forum Aktivistis Perempuan Muda), sementara di Kamboja bersama CYWEN (Cambodian Young Women's Empowerment Network). JASS Southeast Asia mengajak kedua organisasi ini untuk memperluas jangkauan advokasi melalui kampanye SMS dan petisi daring. Adapun di Kamboja, JASS Southeast Asia bersama CYWEN menyampaikan hasil petisi daring kepada KBRI Phnom Penh, Kamboja yang berisi permintaan penangguhan eksekusi Mary (Langara, 2015). Selanjutnya sebagai bentuk solidaritas, JASS Southeast Asia mengajak para stafnya, FMM Indonesia dan CYWEN untuk memprakarsai kampanye lilin dan dipublikasikan pada akun media sosial mereka masing-masing. Selain itu, JASS Southeast Asia memanfaatkan platform Twitter/X dan Facebook untuk menyebarluaskan informasi terkait kasus Mary Jane Veloso, baik dalam bentuk pembaruan perkembangan kasus, dukungan solidaritas lintas negara, maupun amplifikasi narasi yang menekankan posisi Mary sebagai korban perdagangan manusia. JASS Southeast Asia menggunakan tagar-tagar dukungan terhadap Mary seperti #SaveMaryJane, #SaveMaryJaneVeloso, #FreeMaryJane, #StoptheExecution, dan #MaryJaneVeloso.

Secara keseluruhan, keterlibatan JASS Southeast Asia terlihat melalui partisipasinya dalam seruan advokasi yang dimulai oleh Migrante International, sehingga penting untuk dicatat bahwa JASS Southeast Asia bukanlah aktor yang mengawali advokasi. Namun demikian, kontribusi JASS Southeast Asia adalah

bridge-builder yang memiliki peran penting strategis sebagai penghubung mitra atau jaringan, serta mendorong perluasan advokasi secara transnasional. Kontribusi dari perluasan ini sangat krusial mengingat penundaan eksekusi terhadap Mary tidak serta-merta melepaskan dirinya dari status terpidana mati, sehingga tekanan tetap harus dipertahankan (Langara, 2015).

Dengan demikian, uraian ini menunjukkan konfigurasi aktor, pola relasi, serta bentuk keterlibatan advokasi transnasional JASS Southeast Asia dalam menyuarakan kasus Mary Jane Veloso. Selanjutnya, dinamika yang telah dijabarkan akan dianalisis menggunakan kerangka Transnational Advocacy Network (TAN), khususnya melalui empat taktik utama dalam pola bumerang, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Adapun keterlibatan JASS Southeast Asia dilandasi oleh pemahaman mereka terkait interseksionalitas, yakni tidak hanya melihat kondisi Mary sebagai individu dengan status terpidana mati atau korban perdagangan manusia semata, melainkan hasil dari berbagai tautan lapisan interseksi yang menyebabkan kerentanan berlapis. Hal tersebut kemudian turut menjelaskan alasan mengapa advokasi transnasional dibutuhkan, khususnya bagi JASS Southeast Asia untuk mendorong pengakuan terhadap ketidakadilan struktural yang dialami Mary melalui pandangan feminis.